

PENGARUH DAU, DAK, DAN PAD TERHADAP BELANJA LANGSUNG

Fitriya Mala

Fitriyamala1113@gmail.com

Kurnia

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is aimed to test the influence of General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Local Own-source Revenue (PAD) to the direct expenditure of Districts / Cities in East Java Province. The method has been done by using quantitative method. The population of this research is all the Districts / Cities in East Java Province which consist of 29 districts and 9 cities. The sample collection technique has been done by using purposive sampling, namely the process of sampling by first determining the number of samples to be taken, then done the sample by done with certain goals, targets and certain observations in picking a random sample. The data is the secondary data which has been obtained from the Realization Report of Local Government Budget of East Java province with the observation periods in 2014-2016 periods. The data analysis has been carried out by using multiple linear regressions. It has been proven from the result of the research that the General Allocation Fund (DAU) and Local Own-source Revenue (PAD) gives significant influence to the direct expenditure. Meanwhile, Special Allocation Fund (DAK) does not give any significant influence to the direct expenditure.

Keywords: General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Local Own-source Revenue, Direct expenditure

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak di ambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan dengan tujuan-tujuan tertentu, target serta pertimbangan tertentu dalam memilih sampel secara tidak acak. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan realisasi anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Periode observasi pada tahun 2014-2016. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Langsung. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung.

Kata kunci : Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Langsung

PENDAHULUAN

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia, tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan Negara maupun Daerah. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh

aktivitas dan kerja finansial Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2002)

Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik berdasarkan kebutuhan publik. Dengan adanya otonomi daerah di NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang disahkan oleh undang-undang dan diharapkan memberikan dampak kemandirian Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan Negara yang telah dirancang melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah, dan sekarang telah diperbarui menjadi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antar Pemerinta Pusat dan Daerah merupakan awal dari pelaksanaan otonomi daerah dan proses terjadinya perubahan dalam penganggaran keuangan Daerah di Indonesia. Kedua UU tersebut mengatur tentang pokok-pokok penyerahan keuangan kepada Pemerintah Daerah serta pendanaan bagi pelaksanaan kewenangan tersebut. Selain itu terdapat juga UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat Daerah guna mendapatkan sumber pendanaan bagi Pemerintah Daerah.

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah ini adalah adanya desentralisasi fiskal dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah,desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang terdesentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatan yang sebelumnya diatur atau dilakukan oleh Pemerintah Pusat menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak atau retribusi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus) dan pinjaman Daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Tujuan dari transfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standart pelayanan publik. Adanya transfer dana ini bagi pemerintah daerah merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digalih melalui pendanaan sendiri, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan dan lain-lain pendapatan daerah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah, dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, dan diharapkan dimasa yang akan datang ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat hendaknya diminimalisasi guna menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan pembangunan.

Di satu pihak beberapa daerah tergolong sebagai daerah yang beruntung karena memiliki sumber-sumber penerimaan yang potensial bagi daerahnya. Di lain pihak, banyak daerah yang memiliki kemampuan finansial yang jauh dari memadai, yang mengakibatkan daerah-daerah semacam itu mengalami kesulitan dalam pembiayaan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerahnya, sehingga menimbulkan ketimpangan fiskal.

Dalam mengatasi ketimpangan fiskal tersebut, pemerintah memberikan dana perimbangan. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah

dalam mendanai kewenangannya, juga dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pada pemerintah daerah serta dapat digunakan untuk meminimalisasi resiko terjadinya kesulitan keuangan (*financial distress*). Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Tahap pertama dalam penyusunan anggaran daerah yaitu menyusun arah dan kebijakan umum APBD, arah dan kebijakan umum APBD termasuk dalam kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisis fiskal, sedangkan analisis operasional anggaran lebih ditekankan dengan alokasi sumber daya.

Pembangunan daerah yang sangat pesat, pasti membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah yang mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan persediaan dana yang besar untuk membiayai kegiatan tersebut. Belanja pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan ke dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional dalam pemerintah. Dengan belanja yang meningkat, maka dibutuhkan dana yang pasti besar agar belanja kebutuhan daerah itu terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka di harapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.

Belanja Daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Karakteristik Belanja Langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan. Sedangkan Belanja Tidak Langsung pada dasarnya merupakan belanja yang digunakan secara bersama-sama untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan unit kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DAU, DAK, dan PAD terhadap Belanja Langsung.

TINJAUAN TEORETIS

Otonomi Daerah

Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, otonomi daerah merupakan hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah pada hakekatnya berkenaan dengan kelimpahan wewenang pengambilan keputusan, kebijakan, pengelolaan dan publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat (Halim, 2001).

Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Daerah mempunyai kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi yaitu: (1) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. (3) Mengembangkan kehidupan demokrasi. (4) Mewujudkan keadilan dan pemerataan. (5) Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. (6) Menyediakan fasilitas layanan kesehatan.

Dana Alokasi Umum

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi dari dana alokasi umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi

Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif besar.

Pemerintah Pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Dengan adanya transfer DAU dari pemerintah pusat, maka daerah bisa lebih fokus menggunakan PAD yang dimilikinya untuk meningkatkan pelayanan publik.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional (PP No. 55 Tahun 2005). Alokasi Dana Khusus (DAK) dipergunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan, perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup.

Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian Negara/ Departemen teknis. Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK. Dana pendamping dianggarkan dalam APBD, namun daerah yang memiliki kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping.

Pendapatan Asli Daerah

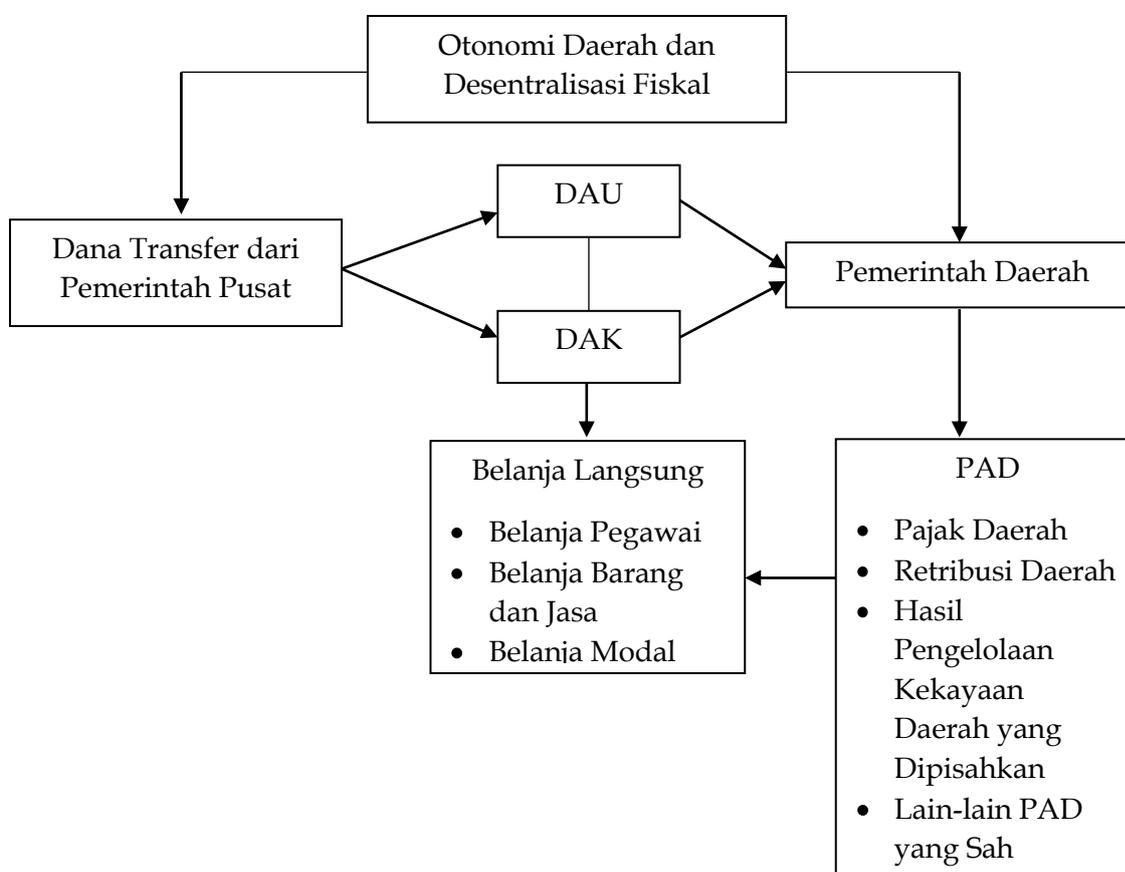
Menurut Halim (2007) tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok Pendapatan Asli Daerah di pisahkan menjadi empat jenis yaitu: (1) Pajak Daerah Menurut UU No.28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa namun berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. (2) Retribusi Daerah Retribusi Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan Salah satu penyebab di berlakukannya otonomi daerah adalah tingginya campurtangan pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan (Setiyono, 2011). (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jenis lain-lain Pendapaatan Asli Daerah yang sah digunakan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan.

Belanja Langsung

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pasal 36 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja langsung merupakan belanja yang

dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari: (1) Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang diberika kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dimana pekerjaan tersebut yang berkaitan dengan pembentukan modal. (2) Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. (3) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aktiva tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai belanja modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.

Rerangka Pemikiran



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Langsung

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sebagian daerah masih ada yang sangat bergantung terhadap dana transfer terhadap pemerintah pusat untuk menjalankan program kerjanya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Pusat memberikan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada tiap-tiap daerah yang bertujuan untuk

menanggulangi ketimpangan fiskal antar daerah yang di sebabkan minimumnya sumber pajak dan potensi alam yang berbeda-beda. Setelah diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengharapkan daerah dapat mengelolah sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU.

H₁ : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Langsung pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Langsung

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang di alokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan proritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan peningkatan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang.

H₂ : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Langsung pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung

Dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian sendiri dalam mengelola keuangannya. Dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai kewajibannya dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk untuk digunakan dalam meningkatkan infrastruktur daerah.

H₃ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Langsung pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambar dari Populasi (Objek) Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif. Penelitian yang menggunakan analisis data sekunder. Penelitian kuantitatif menekankan pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen dan variable dependen, dalam penelitian ini melihat seberapa jauh pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak di ambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan dengan tujuan-tujuan tertentu, target serta pertimbangan tertentu dalam memilih sampel secara tidak acak. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah: (1) Menyajikan data realisasi DAU, DAK, PAD dan Belanja Langsung dalam laporan realisasi APBDnya pada periode 2014-2016. (2) Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempublikasikan laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama 3 tahun berturut-turut pada periode 2014-2016.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung tetapi melalui media perantara atau pihak lain. Sumber datanya di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur mengenai data pertumbuhan ekonomi periode 2014-2016.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain/dependen. Menurut Ghozali (2016:10) tujuan metode variabel independen adalah memahami atau mengidentifikasi mengapa atau bagaimana variabel-variabel tersebut saling berkorelasi. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu: (1) Dana Alokasi Umum adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Kabupaten / Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD. (2) Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan belanja daerah, DAU diberikan kepada pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. (3) Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Tujuan metode dependen adalah menentukan apakah variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara individual dan atau bersamaan Ghozali (2016:6). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Belanja Langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Permendagri 13/2006). Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan yang telah dianggarkan. Belanja langsung dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Belanja Langsung = Belanja Pegawai + Belanja Barang dan Jasa + Belanja Modal

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan interpretasikan. Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Sebelum masuk ke regresi linier berganda. Maka datanya harus diuji terlebih dahulu yaitu di uji asumsi klasik yang bertujuan untuk memastikan data yang di peroleh memenuhi syarat.

Statistik deskriptif

Statistik deskriptif merupakan suatu metode dalam mengorganisir dan menganalisis data kuantitatif, sehingga diperoleh gambaran yang teratur mengenai suatu kegiatan. Pengertian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (Mean), standart deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum.

Tabel 1
Hasil Uji statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAU	114	380.779.789.000	1.709.892.845.000	914.301.900.816	289.594.271.807
DAK	114	-	693.917.527.000	128.196.050.219	142.226.240.643
PAD	114	59.496.296.000	3.839.158.392.000	313.800.225.667	556.076.107.982
BL	114	292.292.723.000	5.566.748.436.000	892.598.810.386	745.158.681.746
Valid N (listwise)	114				

Sumber: Data sekunder diolah

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai minimum sebesar Rp380.779.789.000 Kota yang memiliki Dana Alokasi Umum terendah adalah Kota Mojokerto yaitu pada tahun 2014, oleh karna itu Kota Mojokerto dapat dikatakan mandiri dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerahnya sendiri. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang memiliki nilai maksimum yaitu sebesar Rp1.709.892.845.000 Kota yang memiliki nilai Dana Alokasi Umum (DAU) tertinggi adalah Kabupaten Jember pada tahun 2016, tingginya Dana Alokasi Umum (DAU) pada Kabupaten Jember tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Jember sangat bergantung pada Pemerintah Pusat. Selain itu Dana Alokasi Umum dengan data selama 3 Tahun tersebut memiliki nilai rata-rata (Mean) sebesar Rp914.301.900.816 dengan nilai Standar Deviasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp289.594.271.807.

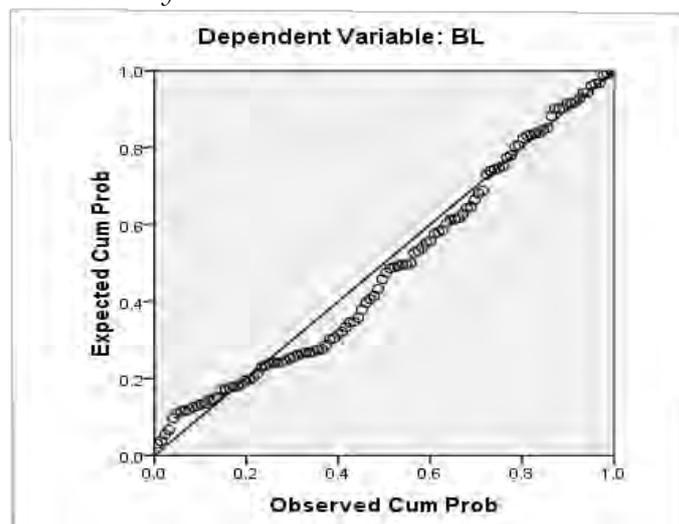
Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai minimum yaitu sebesar 0 kota yang memiliki Dana Alokasi Khusus(DAK) terendah adalah Kota Surabaya pada Tahun 2015, Kota Malang pada Tahun 2016, dan Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2016. Oleh karna itu Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kabupaten Banyuwangi dapat dikatakan mandiri dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerahnya sendiri. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang memiliki nilai maksimum yaitu sebesar Rp693.917.527.000 Kota yang memiliki nilai Dana Alokasi Khusus tertinggi adalah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016, tingginya Dana Alokasi Khusus pada Kabupaten Sidoarjo tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo sangat bergantung pada Pemerintah Pusat. Selain itu Dana Alokasi Khusus dengan data selama 3 Tahun tersebut memiliki nilai rata-rata (Mean) sebesar Rp128.196.050.219 dengan nilai Standar Deviasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp142.226.240.643.

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum yaitu sebesar Rp59.496.296.000 Kota yang memiliki Pendapatan Asli Daerah terendah adalah Kota Batu yaitu pada tahun 2014, oleh karna itu Kota Batu masih sangat bergantung pada dana transfer Pemerintah Pusat. Sehingga Pemerintah Kota Batu harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan menggali terus sumber-sumber yang ada di Daerahnya. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki nilai maksimum yaitu sebesar Rp3.839.158.392.000 Kota yang memiliki nilai Pendapatan Asli Daerah tertinggi adalah Kota Surabaya pada tahun 2016, tingginya Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya memiliki kemandirian dalam menjalankan Otonomi Daerahnya, dengan demikian berarti dana transfer dari Pemerinta Pusat sangatlah kecil. Selain itu Pendapatan Asli Daerah dengan data selama 3 Tahun tersebut memiliki nilai rata-rata (Mean) sebesar Rp3.138.002.256.667 dengan nilai Standar Deviasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp556.076.107.982

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji ini dimaksudkan untuk menentukan apakah variabel-variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji Normalitas juga untuk melihat apakah model regresi yang digunakan sudah baik. Model regresi yang baik yaitu memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik *Normal Probability Plot*. Berikut ini adalah hasil uji normalitas data dengan analisis grafik *Normal Probability Plot*:



Sumber: Data sekunder diolah

Gambar 2

Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot

Tabel 2

Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.20163496
Most Extreme Differences	Absolute	.095
	Positive	.095
	Negative	-.062
Kolmogorov-Smirnov Z		1.010
Asymp. Sig. (2-tailed)		.259

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data sekunder diolah

Hasil grafik plot normal dapat diketahui berada di sepanjang garis 45^o, sedangkan berdasarkan Tabel 2 hasil uji normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test yaitu nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* pada *Asymp. Signifikansi* lebih besar dari 5% (0,05) yaitu sebesar 0,259 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal, sehingga dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Multikolinieritas

Bertujuan untuk mendeteksi adanya problem multikolinieritas, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF).

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	T		Tolerance	VIF
1 (Constant)	8.821	1.518		5.810	.000		
DAU	.182	.068	.132	2.672	.009	.625	1.600
DAK	-.001	.005	-.009	-.218	.828	.921	1.086
PAD	.521	.032	.826	16.268	.000	.588	1.700

a. Dependent Variable: BL

Sumber: Data sekunder diolah

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel independen Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Penapatan Asli Daerah memiliki nilai toleran yang lebih dari 0,10 dan nilai VIF yang kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya), regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi dapat dilihat dari tabel *Durbin Watson* (D-W), yaitu apabila angka D-W berada diantara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.913 ^a	.833	.829	.20437	.991

a. Predictors: (Constant), PAD, DAK, DAU

b. Dependent Variable: BL

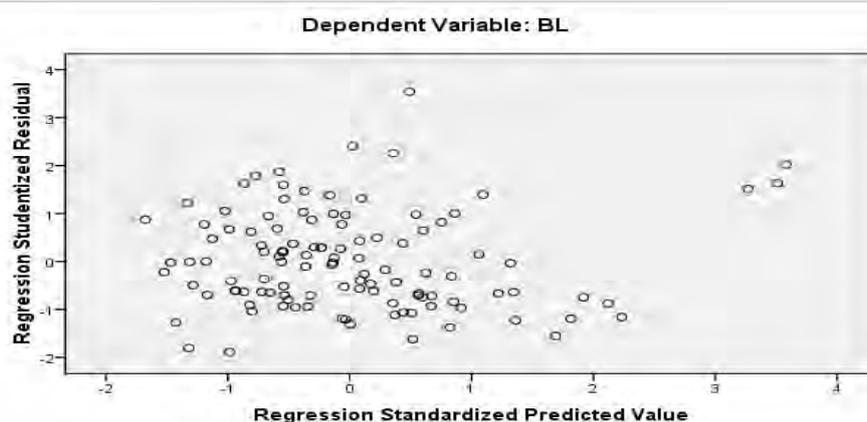
Sumber: Data sekunder diolah

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa pada model regresi tidak terjadi autokorelasi, yang mana ditunjukkan dengan $(-2 < 0,991 < 2)$.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Jika variance residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki kesamaan variance residual suatu periode pengamatan

dengan pengamatan yang lain, atau homokedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil heteroskedastisitas dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Data sekunder diolah

Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Grafik Scatterplot

Berdasarkan gambar 3 grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa data tersebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi yang digunakan.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor yang digunakan dalam model penelitian yaitu variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung. Hasil dari analisis regresi linier berganda yaitu sebagai berikut:

Tabel 5
Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	8.821	1.518		5.810	.000
DAU	.182	.068	.132	2.672	.009
DAK	-.001	.005	-.009	-.218	.828
PAD	.521	.032	.826	16.268	.000

a. Dependent Variable: BL

Sumber: Data sekunder diolah

$$BL = 8,821 + 0,182DAU - 0,001DAK + 0,521PAD$$

Hasil persamaan regresi linier berganda tersebut diatas memberikan pengertian bahwa: (1) Konstanta sebesar 8,821 menunjukkan bahwa jika Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) = 0 atau tidak ada, maka belanja langsung akan sebesar 8,821. (2) Koefisien regresi untuk variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,182. Koefisien positif menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai hubungan searah dengan belanja langsung. Artinya apabila Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat akan diikuti dengan meningkatnya Belanja Langsung. (3) Koefisien regresi untuk variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar -0,001. Koefisien negatif menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai hubungan berlawanan arah dengan belanja langsung. Artinya

apabila Dana Alokasi Khusus (DAK) meningkat akan menyebabkan penurunan terhadap Belanja Langsung. (4) Koefisien regresi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,521. Koefisien positif menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai hubungan searah dengan belanja langsung. Artinya apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat akan diikuti dengan meningkatnya Belanja Langsung.

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel terikat. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Nilai R dan R Square
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.913 ^a	.833	.829	.20437	.991

a. Predictors: (Constant), PAD, DAK, DAU

b. Dependent Variable: BL

Sumber: Data sekunder diolah

Hasil uji koefisien Determinasi dan koefisien korelasi berganda menunjukkan nilai R sebesar 0,913 (91.3%), hal ini menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai hubungan yang erat dengan variabel dependen adalah jika nilai R yang diperoleh lebih dari 50%. sedangkan nilai *R Square* sebesar 0,833 atau 83,3%, ini menunjukkan bahwa variabel belanja langsung yang dapat dijelaskan variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 83,3%, sedangkan sisanya 16,7% dijelaskan faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

Uji Kelayakan Model Regresi (Uji Statistik F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja langsung. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7
Hasil Uji F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	22.976	3	7.659	183.376	.000 ^a
	Residual	4.594	110	.042		
	Total	27.571	113			

a. Predictors: (Constant), PAD, DAK, DAU

b. Dependent Variable: BL

Sumber: Data sekunder diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} dengan tingkat signifikansi 0,000 (di bawah 0,05) sebesar 183,376. Berdasarkan tingkat signifikansinya, berarti variabel independen yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Langsung pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh berpengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel-variabel dependen (Ghozali, 2006). Kriteria pengujian secara parialdengan tingkat level of signifikan $\alpha = 0,05$ yaitu sebagai berikut :

Tabel 8
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	8.821	1.518		5.810	.000
DAU	.182	.068	.132	2.672	.009
DAK	-.001	.005	-.009	-.218	.828
PAD	.521	.032	.826	16.268	.000

a. Dependent Variable: BL

Sumber: Data sekunder diolah

Berdasarkan perhitungan uji regresi berganda yang tercantum pada Tabel 8, maka hasilnya memberikan pengertian bahwa: (1) Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Langsung, hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi untuk Dana Alokasi Umum (DAU) adalah $\alpha = 0,009 < 0,05$ menandakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung. Sehingga H_1 yang menyatakan dugaan adanya pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Langsung diterima. (2) Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Langsung, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah $\alpha = 0,828 > 0,05$ menandakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung. Sehingga H_2 yang menyatakan dugaan adanya pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Langsung ditolak. (3) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah $\alpha = 0,000 < 0,05$ menandakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung. Sehingga H_3 yang menyatakan dugaan adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung diterima.

Pembahasan

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Langsung

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sebagian daerah masih ada yang sangat bergantung terhadap dana transfer terhadap pemerintah pusat untuk menjalankan program kerjanya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah pusat memberikan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada tiap-tiap daerah yang bertujuan untuk menanggulangi ketimpangan fiskal antar daerah yang di sebabkan minimumnya sumber pajak dan potensi alam yang berbeda-beda. Setelah diterapkannya desinralisasi fiskal, pemerintah pusat mengharapkan daerah dapat mengelolah sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan Dana Alokasi Umum saja.

Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Langsung, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05

Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung. Nilai signifikansi positif pada DAU menunjukkan hubungan searah antara Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung, bahwa semakin tinggi jumlah Dana Alokasi Umum maka semakin tinggi pula jumlah Belanja Langsung. Begitupun untuk sebaliknya, apabila semakin rendah Dana Alokasi Umum, maka jumlah Belanja Langsung juga akan semakin rendah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2010) yang meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi Belanja Daerah (studi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah) berkesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki DAU tinggi maka pengeluaran untuk alokasi Belanja Daerahnya juga semakin tinggi. Melihat beberapa hasil penelitian telah menunjukkan bahwa DAU merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Langsung

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan Daerah sesuai dengan prioritas nasional. Alokasi Dana Khusus (DAK) dipergunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan, perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup.

Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Langsung, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,828 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Khusus (DAK) maka pengeluaran Pemerintah Kabupaten berupa Belanja Langsung semakin rendah.

Pemerintah Daerah tidak bergantung terhadap Dana Alokasi Khusus untuk menambah aset tetap atau aset lainnya, hal ini dapat disimpulkan bahwa jumlah Dana Alokasi Khusus baik meningkat atau menurun tidak mempengaruhi jumlah Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur cenderung tidak bergantung pada Dana Alokasi Khusus dalam membiayai kegiatan atau program yang termasuk dalam komponen Belanja Langsung. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap belanja langsung karena alokasi Dana Alokasi Khusus di tiap-tiap Kabupaten/Kota berbeda-beda dan penggunaannya hanya untuk kegiatan tertentu saja. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Febriana, 2013) bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal karena nilai signifikansinya sebesar 0,323.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Langsung

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk modal dasar Pemerintah Daerah dalam pembiayaan pembangunan dan usaha-usaha Daerah untuk memperkecil ketergantungan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Pendapatan Asli Daerah sangat penting, karena semakin besar pendapatan PAD nya akan menunjukkan kemampuan daerahnya dalam menggali sumber keuangannya sendiri yang kemudian menjadi tolak ukur kinerja bagi Pemerintah Daerah dalam proses pengembangan ekonomi Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Langsung, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga hal ini berarti bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung. Nilai signifikansi positif pada PAD menunjukkan hubungan searah antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Langsung, bahwa semakin tinggi jumlah Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula jumlah Belanja Langsung. Begitupun untuk sebaliknya, apabila semakin rendah Pendapatan Asli Daerah, maka jumlah Belanja Langsung juga akan semakin rendah.

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka pengeluaran Pemerintah Kabupaten berupa Belanja Langsung juga semakin tinggi. Begitupun untuk sebaliknya, bahwa semakin rendah Pendapatan Asli Daerah maka jumlah Belanja Langsung juga akan semakin rendah. Dengan Pendapatan Asli Daerah yang besar maka dapat memacu Pemerintah Daerah untuk lebih mengefektifkan program-program baru, guna untuk mensejahterakan masyarakat yang tentunya akan memakan banyak dana untuk merealisasikan program yang direncanakan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Pemerintah Daerah se Jawa-Bali baik Kabupaten dan Kota pada tahun 2004-2005. Susilawati (2013) meneliti tentang PAD dan DAU terhadap alokasi belanja langsung (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur) berkesimpulan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Langsung Daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil uji hipotesis kesimpulan yang diperoleh: (1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung. Hal ini berarti semakin tinggi DAU yang didapatkan oleh Pemerintah Daerah maka semakin meningkat pula Belanja Langsung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. (2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tidak bergantung terhadap DAK, hal ini dapat disebabkan karena Pemerintah Daerah sudah dapat memenuhi kebutuhan belanja langsungnya dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus. (3) Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan utama Pemerintah Daerah yang berasal dari kekayaan sumber daerah itu sendiri, selain itu PAD merupakan kemandirian suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dan keberhasilan Pemerintah Daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diambil maka saran-saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: (1) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur diharapkan untuk mampu meningkatkan kemandirian daerahnya atau lebih meningkatkan PADnya agar tidak terlalu tergantung pada bantuan-bantuan dari Pemerintah Pusat. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah. (2) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat melakukan penelitian dengan menggunakan sampel selain Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur, dan menambah variabel independen lain yang belum digunakan dalam penelitian ini. Serta menambah periode tahun penelitian menjadi 4 tahun sampai 5 tahun atau lebih, karena dipenelitian ini hanya menggunakan periode penelitian 3 tahun, yaitu tahun 2014-2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. BPFY-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Darwanto dan Y. Yustikasari, 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.
- Febriana, S. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi 4 (9)*: 1-22.
- Ghozali, 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi 4. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Cetakan kedelapan. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2001. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta
- _____. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Lembaga Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor Tahun 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen keuangan daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049. Jakarta.
- _____. Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- _____. Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- Rahmawati, N. 2010. Pengaruhh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pemerinth Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Setiyono, N. 2011. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2008 dan 2009. *Skripsi*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Susilawati. E. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Langsung Daerah. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.